

**ANALISIS PEMETAAN WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA
DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN BELANJA MODAL,
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH :

HARI ADRIA

NIM/BP :1207315/2012

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

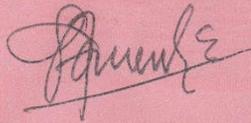
ANALISIS PEMETAAN WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA
DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN BELANJA MODAL,
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN

Nama : Hari Adria
NIM/TM : 1207315/2012
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2018

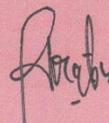
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



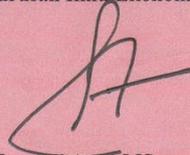
Drs. Akhirmen, M.Si
NIP. 19621105 198703 1 002

Pembimbing II



Melti Roza Adry, SE, ME
NIP. 19830505 200604 2 001

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Drs. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

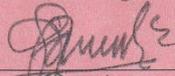
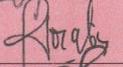
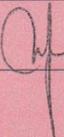
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS PEMETAAN WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA
DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN BELANJA MODAL,
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN**

Nama : Hari Adria
NIM/TM : 1207315/2012
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2018

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Drs. Akhirmen, M.Si	1. 
2	Sekretaris	: Melti Roza Adry, SE, ME	2. 
3	Anggota	: Drs. Zul Azhar, M.Si	3. 
4	Anggota	: Mike Triani, SE, MM	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hari Adria
Nim/Tahun Masuk : 1207315/2012
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/17 Desember 1994
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek Wisma Indah V Blok F1 No 10 Tabing Padang
No. Hp/Telp : 081372397447
Judul Skripsi : Analisis Pemetaan Wilayah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Berdasarkan Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan.

Dengan ini menyatakan:

1. Karyatulis/ skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karyatulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh tim pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Februari 2018

Yang Menyatakan,



Hari Adria
1207315/2012

ABSTRAK

Hari Adria, 2012/1207315 : Analisis Klasifikasi Wilayah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Berdasarkan Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. Skripsi, Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah Bimbingan Bapak Drs. Akhirmen, MSi dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi wilayah belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Sumatera Barat dan klasifikasi wilayah belanja modal terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dimana penulis hanya menjelaskan hubungan belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berdasarkan klasifikasi wilayah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif, penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan dari data yang sudah di publikasikan oleh instansi terkait, yaitu BPS provinsi Sumatera Barat, waktu penelitian pada bulan februari 2017 sampai selesai. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan antara data time series dan data cross section. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumentasi, dari tahun 2011-2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Tipolgi Klassen.

Hasil penelitian klasifikasi wilayah di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi dan belanja modal dengan kemiskinan, penelitian ini adalah analisis deskriptif yang dideskripsikan dalam bentuk tabel kuadran dan Analisis tripologi klassen, dimana pengelompokan berdasarkan belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi menghasilkan bahwa dari tahun 2011 sampai 2016 rata-rata Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berada pada kuadran IV kelompok yang paling buruk, dimana belanja modal rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten PadangPariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Pariaman. Selanjutnya pengelompokan berdasarkan belanja modal dengan kemiskinan menghasilkan bahwa dari tahun 2011 sampai 2016 rata-rata Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berada pada kuadran I kelompok belum ideal, dimana belanja modal yang tinggi belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Kata kunci: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul *“Analisis Pemetaan Wilayah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Berdasarkan Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan”* dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Drs. Akhirmen, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Melty Roza Adry, SE, M.E selaku pembimbing II yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Ali Anis, M.S selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Melty Roza Adry, SE, M.E

selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Akhirmen, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Melty Roza Adry, SE, M.E selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan penuh sabar mendengar keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, organisasi, dan bantuan miral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bapak ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa kepada kedua Orang Tua penulis yang selalu mendoakan penulis dalam setiap sujudnya, serta memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materil kepada penulis dan saudari-saudari penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada kakak penulis Nisa Anggraini, SH yang selalu menemani dan memberikan dukungan moril maupun materil serta doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. *Special thanks for* Ayunita Rahmah, SKM yang telah menemani penulis selama 1 tahun ini dan selalu mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis.
10. *Special thanks for my close friend* Alhady Bil Makruf, SE, Ahmad Fauzan, SE, Afria Nanda, SE, Asma Ulyarahman, SE, Afdal Mulya, SE, Febbi Wulandari, SE, Herlin Putri Morita, SE, Lita Agustia, SE, Yessika Emilia Rahmi, SE, Yeltari Bysolpi, SE dan Rahimul Putra, Amd yang selalu memberikan semangat dan doa serta memberikan canda tawa, yang mampu menghilangkan penat.
11. Thanks for Capoeira Padang Family seperti Zul Okta Ferison, ST, Husnul Khatimah Amin, Amd, Heska Pratiwi, Amd, Habibie Abdul Haqiqi dan Dimas Angriawan dll yang telah mendoakan penulis.
12. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2012 tanpa terkecuali.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelsaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan

penulis khususnya. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang, Februari 2018

Penulis,

Hari Adria

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Kajian Teori.....	14
1. Pertumbuhan Ekonomi	14
2. Kemiskinan	20
3. Belanja Modal.....	28
4. Teori Wilayah.....	33
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian	43
C. Variabel dan Jenis Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Definisi Operasional.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	50
1. Gambar Umum Penelitian	50
a. Letak Geografis Provinsi Sumatera Barat	50
b. Iklim Provinsi Sumatera Barat	51
c. Penduduk Provinsi Sumatera Barat	51
2. Deskripsi Variabel Penelitian	53
a. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat	53
b. Presentase Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat	56
c. Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat	58
3. Klasifikasi wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Berdasarkan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi	60
4. Klasifikasi wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Berdasarkan Belanja Modal dan Tingkat Kemiakinan	77
B. Pembahasan	94
1. Klasifikasi wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Berdasarkan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi	94
2. Klasifikasi wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Berdasarkan Belanja Modal dan Kemiskinan	98
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Sumatera Barat Tahun 2011-2016	5
1.2 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Sumatera Barat Tahun 2011-2016	8
1.3 Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Sumatera Barat Tahun 2011-2016	10
4.1 Luas Daerah, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	52
4.2 Hasil Analisis Tripologi Klassen Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011.....	62
4.3 Hasil Analisis Tripologi Klassen Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012.....	63
4.4 Hasil Analisis Tripologi Klassen Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013.....	66
4.5 Hasil Analisis Tripologi Klassen Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014.....	68
4.6 Hasil Analisis Tripologi Klassen Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015.....	70
4.7 Hasil Analisis Tripologi Klassen Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016.....	74
4.8 Hasil Analisis Tripologi Klassen Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2016	76
4.9 Hasil Analisis Tripologi Klassen Belanja Modal Dengan Tingkat Kemiskinan Tahun 2011.....	78
4.10 Hasil Analisis Tripologi Klassen Belanja Modal Dengan Tingkat Kemiskinan Tahun 2012.....	79
4.11 Hasil Analisis Tripologi Klassen Belanja Modal Dengan Tingkat Kemiskinan Tahun 2013.....	82

4.12 Hasil Analisis Tripologi Klassen Belanja Modal Dengan Tingkat Kemiskinan Tahun 2014.....	85
4.13 Hasil Analisis Tripologi Klassen Belanja Modal Dengan Tingkat Kemiskinan Tahun 2015.....	88
4.14 Hasil Analisis Tripologi Klassen Belanja Modal Dengan Tingkat Kemiskinan Tahun 2016.....	90
4.15 Hasil Analisis Tripologi Klassen Belanja Modal Dengan Tingkat Kemiskinan Tahun 2011-2016	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Perpotongan Keynesian.....	18
2. Gambar Lingkaran Setan Kemiskinan	21
3. Kerangka Konseptual Analisis Pemetaan Wilayah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Berdasarkan Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan	45
4. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2011-2016.....	53
5. Grafik Presentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2011-2016.....	56
6. Grafik Laju Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2011-2016	59
7. Klasifikasi Daerah Tripologi Klassen Berdasarkan Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi 2011	61
8. Klasifikasi Daerah Tripologi Klassen Berdasarkan Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi 2012.....	63
9. Klasifikasi Daerah Tripologi Klassen Berdasarkan Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi 2013	65
10. Klasifikasi Daerah Tripologi Klassen Berdasarkan Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi 2014	67
11. Klasifikasi Daerah Tripologi Klassen Berdasarkan Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi 2015	70
12. Klasifikasi Daerah Tripologi Klassen Berdasarkan Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi 2016	74
13. Klasifikasi Daerah Tripologi Klassen Berdasarkan Tingkat Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi 2011.....	78

14. Klasifikasi Daerah Tripologi Kemiskinan Dengan	Klassen Berdasarkan Pertumbuhan	Tingkat Ekonomi	79
15. Klasifikasi Daerah Tripologi Kemiskinan Dengan	Klassen Berdasarkan Pertumbuhan	Tingkat Ekonomi	82
16. Klasifikasi Daerah Tripologi Kemiskinan Dengan	Klassen Berdasarkan Pertumbuhan	Tingkat Ekonomi	85
17. Klasifikasi Daerah Tripologi Kemiskinan Dengan	Klassen Berdasarkan Pertumbuhan	Tingkat Ekonomi	87
18. Klasifikasi Daerah Tripologi Kemiskinan Dengan	Klassen Berdasarkan Pertumbuhan	Tingkat Ekonomi	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2011-2016	111
2. Presentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2011-2016	112
3. Laju Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2011-2016.....	113
4. Hasil Pengelompokkan tripologi klassen berdasarkan Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2011-2016	114
5. Hasil Pengelompokkan tripologi klassen berdasarkan Belanja Modal Dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2011- 2016	115

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Pembangunan perekonomian dalam suatu negara, pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam kurun waktu tertentu, karena umumnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output. Sehingga pada saatnya nanti akan memberikan suatu balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan nasional atau pendapatan daerah yang terjadi di suatu negara dari tahun ketahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dinilai dapat membuat keberhasilan program-program pembangunan, karena dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan memberikan pembiayaan pembangunan negara yang lebih adil dan merata di segala bidang baik itu untuk infrastruktur fisik maupun infrastruktur non fisik.

Kondisi daerah di Indonesia yang secara geografis dan sumberdaya alam yang berbeda, mengakibatkan beberapa daerah mampu tumbuh dengan cepat sementara daerah lainnya tumbuh dengan lambat, sehingga kemampuan

ini akan menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam pembangunan dan pendapatan antar daerah, maka untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menetapkan Undang-undang No. 25/Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang No.32/Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, yang berarti bahwa dalam hal pembangunan di daerah diserahkan pada masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya sebagai pengawas/pengontrol, maka masing-masing daerah harus berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan kebijakan dan pembangunannya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin untuk membiayai penyelenggaraan daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Pengeluaran pemerintah di sektor belanja modal memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah untuk kegiatan publik, misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, akan meningkatkan perekonomian. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana akan mendorong investasi, dengan adanya investasi ekonomi akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap

pengangguran dan memperkecil kemiskinan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perkapita.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh keterbatasan, ketidakmampuan, dan kekurangan. Seperti keterbatasan memperoleh kebebasan dan hidup sesuai tingkat harapan hidup, ketidakmampuan untuk mendapatkan pendidikan, akses fasilitas air bersih, dan kesehatan yang memadai, serta kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar sandang dan pangan.

Masyarakat miskin umumnya memiliki masalah dalam mendapatkan kesempatan kerja dan usaha, terbatasnya peluang mengembangkan usaha. keterbatasan modal, kurangnya keterampilan dan pengetahuan menyebabkan masyarakat miskin. Kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional, kemiskinan merupakan masalah pokok yang penanggulangannya tidak dapat ditunda lagi.

Secara empiris dapat dikatakan bahwa belanja modal yang di anggarkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan perekonomian suatu daerah. Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya yang merupakan *Social Overhead Capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai

kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Pemerintah menganggarkan belanja modal yang diperuntukkan dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah.

Studi empiris hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda, hal ini terungkap dari Penelitian yang dilakukan Putu, Kadek dan Gede (2014) mengemukakan di Kabupaten Buleleng peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian.

Selanjutnya Marganda dan Sirojuzilam (2009) mengemukakan pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan. Namun tidak semua peneliti setuju bahwa belanja modal dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Cheng dan Lee (2005) mengemukakan bahwa di Taiwan pengeluaran pemerintah yang terlalu besar tidak mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi menghambat pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh *crowding out effect* atau peningkatan pajak.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak potensi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan antara lain melalui peningkatan output (PDRB), peningkatan pengeluaran pemerintah serta perbaikan kualitas sumber daya manusia dan program-program lainnya. Berikut ini merupakan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 1 seperti berikut :

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2011-2016.s

KABUPATEN DAN KOTA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
01. kepulauan mentawai	5,28	5,37	5,77	5,49	5,24	5,03	5,36
02. pesisir selatan	5,78	5,82	5,87	5,70	5,87	5,30	5,72
03. solok	5,02	6,16	5,89	5,62	4,99	5,30	5,50
04. sijunjung	6,11	6,15	6,14	6,02	5,66	5,27	5,89
05. tanah datar	5,84	5,61	5,85	5,78	5,31	5,03	5,57
06. padang pariaman	5,85	5,94	6,18	6,03	6,16	5,49	5,94
07. agam	6,01	6,18	6,14	5,90	5,53	5,41	5,86
08. lima puluh kota	6,56	6,15	6,19	6,01	5,57	5,34	5,97
09. pasaman	5,36	6,01	5,89	5,87	5,26	5,06	5,57
10. solok selatan	5,58	6,04	6,13	5,90	5,35	5,11	5,68
11. dharmasraya	6,56	6,19	6,50	6,24	5,90	5,34	6,12
12. pasaman barat	6,33	6,33	6,41	6,09	5,64	5,32	6,02
13. padang	6,23	6,17	6,64	6,54	6,39	6,14	6,35
14. solok	6,90	6,76	6,41	6,00	5,98	5,78	6,30
15. sawah lunto	5,45	5,53	6,11	6,04	5,97	5,80	5,82
16. padang panjang	6,31	5,97	6,31	6,10	5,86	5,80	6,06
17. bukittinggi	6,12	6,55	6,30	6,19	6,09	6,06	6,22
18. payakumbuh	6,91	6,62	6,56	6,47	6,19	6,08	6,47
19. pariaman	5,94	6,13	6,06	5,99	5,78	5,57	5,91
SUMATERA BARAT	6,04	6,10	6,26	6,10	5,84	5,58	5,99

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, 2017.

Tabel 1 memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Dapat kita lihat rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011 sampai tahun 2016 sebesar 5,99 persen. Rata-rata Laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 5,36 persen. Sedangkan belanja modal Kabupaten Kepulauan Mentawai tergolong tinggi yaitu sebesar 19,16 persen. Hal ini disebabkan karena masalah manajemen dan ketidaksiapan aparat atau pejabat pengelolaan anggaran dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini menyebabkan masih terbatasnya sarana dan prasana transportasi dalam pulau, antar pulau dan keluar kabupaten dan keberadaan prasarana jalan dan jembatan yang masih memprihatinkan, karena beberapa pulau masih ada yang belum mempunyai jaringan jalan.

Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat mengandalkan jalur laut dalam menghubungkan Kepulauan Mentawai dengan daratan Sumatera dan antar pulau di Kepulauan Mentawai itu sendiri. Namun kondisi angkutan laut yang relatif masih terbatas, dimana permasalahan adalah masih rendahnya frekuensi layanan angkutan laut reguler antar pulau. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi rendah.

Tabel 1 juga memperlihatkan fluktuasi data laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Kepulauan Mentawai, terjadi kenaikan dari tahun 2011 sampai dengan 2013 selanjutnya pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kepulauan Mentawai mengalami penurunan menjadi 5,49 persen, ini disebabkan karna

turunnya belanja modal pada tahun yang sama yaitu sebesar 2,53 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya hubungan positif antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Mentawai. Pada tahun 2015 dan 2016 pertumbuhan ekonomi kepulauan Mentawai juga mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan belanja modal justru mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan peningkatan belanja modal di kabupaten mentawai pada tahun 2015 dan 2016 belum dikelola dengan maksimal oleh pemerintah daerah dan penambahan belanja modal di daerah ini masih belum mampu menggerakkan perekonomian daerah tersebut.

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu di kota Payakumbuh sebesar 6,47 persen. Hal ini disebabkan karena belanja modal di Kota Payakumbuh tergolong tinggi yaitu sebesar 23,99 persen. Sehingga dengan meningkatnya belanja modal maka pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh menjadi tinggi. Belanja modal memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi belanja modal maka pertumbuhan ekonomi di suatu daerah juga akan semakin tinggi.

Selain pertumbuhan ekonomi, masalah makro ekonomi lainnya adalah kemiskinan tinggi rendahnya kemiskinan juga tergantung pada besarnya alokasi belanja modal di suatu wilayah. Pada prinsipnya kemiskinan menggambarkan kondisi dimana terjadi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya tingkat pendapatan, atau kemiskinan ini menggambarkan suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan dan sandang. Seperti yang disebutkan oleh BPS bahwa kemiskinan merupakan

suatu kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.

Berikut ini disajikan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai 2015, seperti pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2011-2016

KABUPATEN DAN KOTA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
Kep.Mentawai	18,9	16,7	16,1	15	15,5	15,12	16,21
Pesisir Selatan	9,75	8,68	8,64	7,82	8,46	7,92	8,55
Kab.Solok	11,2	10	10,3	9,53	10,00	9,32	10,07
Swl/Sijunjung	9,94	8,79	8,53	7,74	7,87	7,60	8,41
Tanah Datar	6,57	5,95	5,77	5,29	5,82	5,68	5,85
Padang Pariaman	11,3	10,1	9,17	8,39	8,86	8,91	9,45
Agam	9,39	8,43	7,68	7,02	7,58	7,83	7,99
50 Kota	9,96	8,89	8,26	7,48	7,65	7,59	8,31
Pasaman	10,4	9,31	8,37	7,6	8,14	7,65	8,58
Solok Selatan	10,6	9,37	8,12	7,33	7,52	7,35	8,38
Dharmasraya	10,1	8,82	7,74	6,97	7,17	7,16	7,99
Pasaman Barat	9,14	8,04	7,86	7,08	7,93	7,40	7,91
Padang	6,02	5,3	5,02	4,56	4,93	4,68	5,09
Kota Solok	6,72	5,87	4,6	4,16	4,12	3,86	4,89
Sawahlunto	2,34	2,17	2,28	2,25	2,22	2,21	2,25
Padang Panjang	7,25	6,5	6,66	6,4	6,74	6,75	6,72
Bukittinggi	6,49	5,73	5,36	4,96	5,36	5,48	5,56
Payakumbuh	10,1	9	7,81	7,01	6,67	6,46	7,84
Pariaman	5,66	5,02	5,35	5,12	5,42	5,23	5,30
Sumatera Barat	8,99	8	7,56	6,89	7,31	7,09	7,64

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, 2017.

Tabel 2 dapat memperlihatkan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir. Rata-rata laju tingkat kemiskinan tertinggi selama tahun 2011 sampai 2016 yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 16,21 persen. Tingginya tingkat kemiskinan ini disebabkan karena Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wilayah kepulauan sehingga mata pencarian pada Kepulauan Mentawai rata-rata sebagai nelayan dan kurangnya keterampilan masyarakat dalam

meningkatkan sumber mata pencariannya. Tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah dan tingkat kesehatan yang kurang memadai serta rendahnya pendapatan masyarakat. Faktor berikutnya adalah kurangnya sumber-sumber informasi dan modal serta masalah geografis dan akses jalan juga menjadi kendala. Pembangunan ekonomi yang belum tepat sasaran sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Kepulauan Mentawai tidak sesuai dengan karakteristik dan potensi dari wilayah tersebut. Jika dibandingkan dengan belanja modal, Kepulauan Mentawai memiliki belanja modal yang cukup tinggi. Namun belanja modal yang dimiliki kabupaten Kepulauan Mentawai masih belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan di kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tingkat kemiskinan terendah yaitu kota Sawahlunto sebesar 2,25 persen, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada belanja modal di kota Sawahlunto yaitu sebesar 25,69 persen. Dengan tingginya belanja modal maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah karena belanja modal memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan.

Peran pemerintah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu peran pemerintah adalah melalui kebijakan fiskal yakni suatu usaha pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Struktur belanja daerah pada saat ini terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak

langsung. Belanja modal adalah salah satu unsur dari belanja langsung, yaitu belanja yang dipengaruhi oleh adanya program atau kegiatan. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Definisi belanja modal mempunyai kesamaan dimensi dengan definisi belanja pembangunan. Belanja pembangunan diartikan sebagai pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan menambah aset atau kekayaan bagi suatu daerah/wilayah.

Berikut ini merupakan laju pertumbuhan belanja modal kabupaten dan kota di Sumatera Barat dapat di lihat pada tabel 3 seperti berikut :

Tabel 3 Pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2011-2016 (persen)

NO	KABUPATEN/KOTA	Tahun						Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Kep.Mentawai	20,75	27,07	10,75	2,53	43,2	42,9	24,53
2	Pesisir Selatan	2,55	-0,59	29,77	27,79	29,2	24,5	18,86
3	Kab.Solok	57,32	54,87	6,9	21,93	1,92	24,8	27,96
4	Swl/Sijunjung	-5,82	-17,3	55,54	-9,1	16	49,9	14,88
5	Tanah Datar	113,6	11,18	48,08	-3,92	11,4	56,9	39,52
6	Padang Pariaman	108,2	-25,6	49,64	2,18	3,84	31,6	28,31
7	Agam	92,93	1,85	86,02	-5,76	5,18	34,1	35,72
8	50 Kota	40,45	9,27	45,62	16,69	-8,98	53,9	26,16
9	Pasaman	133,7	13,89	36,25	6,11	11,8	51,5	42,2
10	Solok Selatan	48,53	32,14	11,55	11,02	17,2	28,2	24,77
11	Dharmasraya	0,69	28,8	7,99	16,86	44,1	5,62	17,34
12	Pasaman Barat	-12,14	69,8	-64,7	262	0,13	61,4	52,75
13	Padang	4,72	56,57	31,59	-5,75	5,36	96,3	31,47
14	Kota Solok	23,92	68,52	-14,9	-5,65	14,9	74,2	26,84
15	Sawahlunto	29,38	-4,12	1,38	28,23	53,8	45,5	25,69
16	Padang Panjang	-17,43	-29	44,74	-5,14	71,8	52,1	19,5
17	Bukittinggi	5,3	0,55	0	50,88	-9,64	2,12	8,2
18	Payakumbuh	-26,28	45,87	17,48	34,95	56,5	15,5	23,99
19	Pariaman	85,35	-29,6	63,28	-3,09	33,4	31,1	30,08
	Sumatera Barat	26,61	14,14	21,79	12,42	18	41,6	22,41

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, 2017.

Dilihat dari rata-rata pertumbuhan belanja modal di kabupaten/kota di Sumatera Barat berfluktuasi selama periode 2011 sampai 2016. Pada tabel 3 dapat memperlihatkan bahwa kabupaten Pasaman Barat menjadi daerah dengan rata-rata laju pertumbuhan belanja modal tertinggi yaitu sebesar 52,75 persen, sehingga dengan tingginya belanja modal di kabupaten Pasaman Barat maka laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten Pasaman meningkat sebesar 6,02 persen. Dimana belanja modal memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi, apabila belanja modal tinggi maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi dan apabila belanja modal turun maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan. Akan tetapi, dilihat dari tingkat kemiskinan di kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar 7,91 persen. Hal ini tergolong tinggi berarti dengan tingginya belanja modal, maka tidak menutup kemungkinan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, sedangkan rata-rata laju pertumbuhan belanja modal terendah yaitu kota Bukittinggi sebesar 8,2 persen. Akan tetapi dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi di kota Bukittinggi tergolong tinggi yaitu sebesar 6,22 persen dan tingkat kemiskinan tergolong rendah yakni sebesar 5,56 persen, hal ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kota Bukittinggi.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis perlu mengkaji tentang Pemetaan kemampuan daerah dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi dan belanja modal serta kemiskinan dan belanja modal pada kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat, maka dari itu penulis tertarik untuk

melakukan penelitian tentang “**Analisis Klasifikasi Wilayah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Berdasarkan Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana klasifikasi wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat berdasarkan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi?
2. Bagaimana klasifikasi wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat berdasarkan belanja modal dan kemiskinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Melakukan klasifikasi wilayah belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Melakukan klasifikasi wilayah belanja modal terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta sebagai pengembangan pengetahuan penulis dalam menulis karya ilmiah.

2. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini dapat menjadi rujukan dan dapat memberikan masukan serta sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan ekonomi.
3. Bagi peneliti lebih lanjut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan berguna bagi penerapan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberi sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan ilmu ekonomi, terutama pada pokok bahasan otonomi daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Para teoritikus lainnya berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan penambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan, kebahagiaan, rasa aman dan tentram yang dirasakan masyarakat luas. Konsentrasi aktivitas ekonomi secara parsial dalam suatu Negara menunjukkan suatu proses selektif di pandang dari dimensi geografis (Kuncoro, 2004:129). Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi acuan dalam menilai perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Perekonomian suatu negara atau daerah dapat dilihat dari sejauhmana dan seberapa besar terjadinya pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut.

Menurut Nanga (2001:260-261) setiap negara berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakatnya dapat dimaksimumkan dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Todaro (2003:99) mendefenisikan pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada

penduduknya. Kemampuan ini tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukan, oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses kenaikan output suatu negara dalam jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Defenisi ini memiliki tiga komponen : pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan ekspansi GDP potensial atau output nasional negara. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi terjadi apabila batas kemungkinan produksi bangsa (*produksi possibility frontier/ PPF*) bangsa bergeser ke luar. Konsep yang berkaitan erat adalah tingkat pertumbuhan *output per orang*. Ini menentukan tingkat ketika standar-standar hidup negara naik. Negara-negara terutama menaruh perhatian pada pertumbuhan output perkapita karena menyebabkan peningkatan rata-rata pendapatan. Pertumbuhan ekonomi meliputi pertumbuhan output potensial pada jangka panjang. Pertumbuhan output per kapita merupakan sasaran

penting pemerintah karena berkaitan dengan peningkatan rata-rata riil pendapatan dan standar-standar hidup (Samuelson, 2001:249).

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi Klasik terutama menumpahkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan mereka dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan.

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses", karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya. Atas sudut pandang tersebut, penelitian ini menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi yang akan dilihat dari sudut pandang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui

dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu ($PDRB_t$) dengan PDRB sebelumnya ($PDRB_{t-1}$).

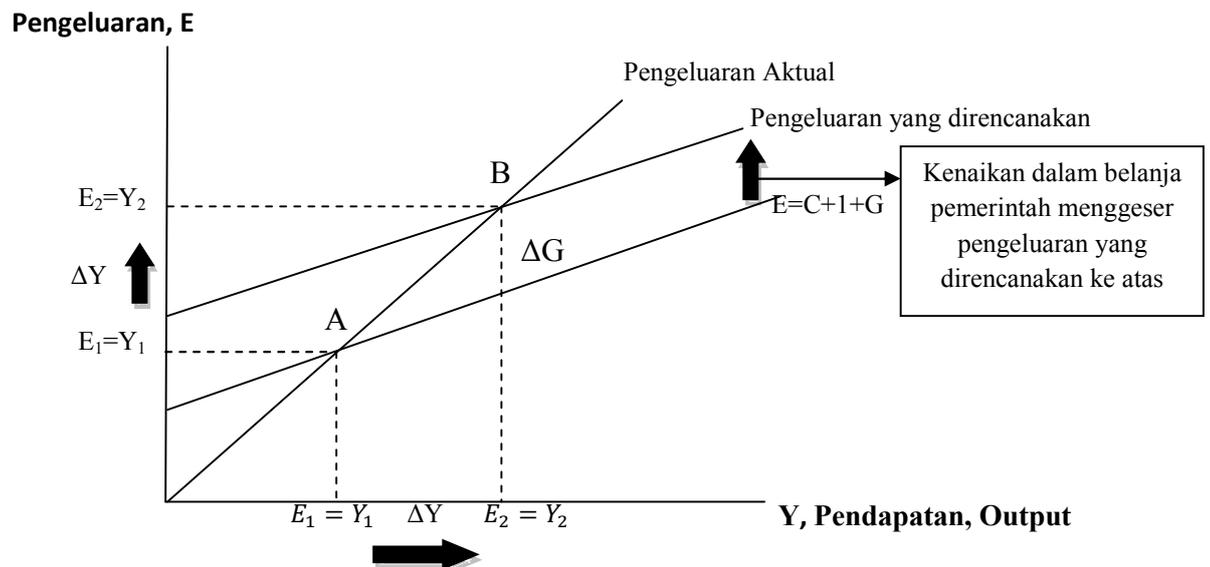
Menurut ekonom Klasik, Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 2004:374). Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga:

- a. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
- b. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.
- c. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Menurut Todaro (2004:127) sumber daya yang akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi di masa yang akan datang disebut investasi diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Teori yang membahas mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi diuraikan panjang lebar dalam *theory*

Keynes. Teori ini menguraikan bahwa Setiap pengeluaran yang dilakukan berimplikasi pada penerimaan pendapatan yang lebih besar. Belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran, maka belanja pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Jika pembelian pemerintah naik sebesar ΔG , maka kurva pengeluaran yang direncanakan bergeser ke atas sebesar ΔG sehingga titik keseimbangan perekonomian bergerak dari titik A ke titik B.



Gambar 1 : Kenaikan dalam pengeluaran pemerintah dan Perpotongan Keynesian

Gambar 1 menunjukkan bahwa kenaikan dalam belanja pemerintah mendorong adanya kenaikan pendapat yang lebih besar. Yaitu, ΔY adalah lebih besar dari ΔG . Rasio $\Delta Y/\Delta G$ disebut pengganda belanja pemerintah (Government-Purchase multiplier), rasio ini menyatakan seberapa besar pendapatan meningkat dalam menanggapi kenaikan \$1 dalam belanja

pemerintah, implikasi dari perpotongan keynesian adalah bahwa pengganda belanja pemerintah lebih besar dari 1.

Adanya pergerakan keseimbangan yang diciptakan pengeluaran pemerintah dari satu titik keseimbangan kepada titik keseimbangan yang lainnya, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat turut meningkatkan pendapatan keseimbangan suatu negara. Alasannya adalah bahwa menurut fungsi konsumsi $C = C(Y-T)$ pendapatan yang lebih tinggi. Ketika kenaikan belanja pemerintah meningkatkan pendapatan, itu juga meningkatkan konsumsi, yang selanjutnya meningkatkan pendapatan, ekuilibrium bergerak dari titik A ke titik B dan pendapatan meningkat dari Y_1 ke Y_2 , kemudian meningkatkan konsumsi dan seterusnya. Karena itu dalam model ini, kenaikan belanja pemerintah menyebabkan kenaikan pendapatan yang lebih besar ((Mankiw, 2007:279)).

Berdasarkan penjelasan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini karena pengeluaran pemerintah memiliki peran ekonomi dan mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat dan anggaran pembangunan dialokasikan terutama untuk membiayai proyek-proyek yang tidak dibiayai sendiri oleh masyarakat. Pengeluaran pemerintah digunakan sepenuhnya untuk kegiatan ekonomi yang memberikan dorongan bagi perkembangan ekonomi terlebih bila belanja modal pemerintah daerah mengindikasikan besarnya pembangunan maupun perbaikan infrastruktur. Jadi pertumbuhan ekonomi bisa meningkat,

dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka akan bisa mengurangi jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan.

2. Kemiskinan

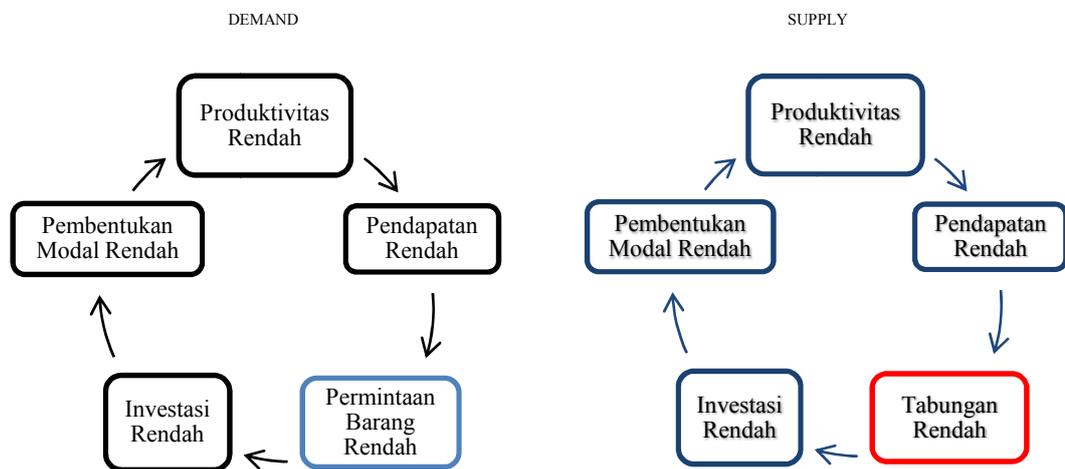
a. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*vicious circle of poverty*)

Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse 1953 dalam Jhingan (2012:33) yang mengatakan: “Lingkaran setan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat. Si miskin misalnya, selalu kurang makan; karena kurang makan kesehatannya menjadi buruk; karena fisiknya lemah kapasitas kerjanya rendah; karena kapasitas kerja rendah penghasilannya pun rendah, dan itu berarti ia miskin, akhirnya ia tidak akan mempunyai cukup makan; dan seterusnya. Keadaan ini yang dinamakan ke dalam dalil kuno : “Suatu negara miskin karena ia miskin”.

Lingkaran setan pada pokoknya berasal dari fakta bahwa produktivitas total dinegara terbelakang sangat rendah sebagai akibat kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna dan keterbelakangan perekonomian. Lingkaran setan kemiskinan dilihat dari sudut permintaan dijelaskan sebagai berikut: rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah, sehingga pada gilirannya tingkat investasi pun rendah. Tingkat investasi yang rendah kembali menyebabkan modal kurang dan produktivitas rendah.

Jika dilihat dari sudut penawaran: produktivitas rendah tercermin di dalam pendapatan yang rendah. Pendapatan rendah berarti tingkat tabungan juga rendah. Tingkat tabungan yang rendah menyebabkan tingkat investasi rendah dan modal kurang. Kekurangan modal pada gilirannya bermuara pada produktivitas yang rendah Jhingan, (2012:33-34).

Berikut gambar lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) versi Nurkse :



Gambar A.1 Lingkaran Setan Kemiskinan

Sumber Nurkse (1953) dalam Jhingan (2012:34)

Menurut pendapatnya inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap pembangunan yang terjadi pada negara sedang berkembang. Suatu negara dikatakan miskin karena ia terbelakang. Ia terbelakang karena ia miskin dan tetap terbelakang karena tidak mempunyai sumber yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan.

Pengertian kemiskinan secara umum dipahami dengan suatu permasalahan yang dikaitkan dengan sektor ekonomi masyarakat, padahal jika dilihat secara luas kemiskinan dapat dilihat dari sudut pandang baik sosial maupun budaya dari masyarakat itu sendiri. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat dimana terdapat kondisi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimulai dari pemenuhan papan, sandang, maupun pangan. Hal seperti ini biasa terjadi dikarenakan rendahnya penghasilan masyarakat dan juga rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Hal seperti ini dapat kita lihat pada suatu Negara berkembang yang memiliki tingkat penduduk yang tinggi sehingga terjadi ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang dapat memicu ketimpangan sosial.

Menurut Sharp dalam Kuncoro (2006:120) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika di pandang dari sisi ekonomi. *Pertama* kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitas rendah. *Kedua* kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pda gilirannya upah rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan, adanya diskriminasi atau keturunan. *Ketiga* kemiskinan muncul karena perbedaan akses modal.

Garis kemiskinan dibedakan menurut tempat dan waktu, jadi setiap

daerah baik di desa maupun di kota memiliki nilai yang berbeda-beda. Batas garis kemiskinan dibedakan antara desa dan kota. Perbedaan ini sangat signifikan antara di desa dan di kota, hal ini disebabkan pada perbedaan yang kompleks antara di desa dan di kota. Kemiskinan menurut konsep ekonomi adalah kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Meskipun kemiskinan menurut konsep ekonomi dapat diukur dari kecukupan pendapatan, kemiskinan juga dapat dilihat dari ciri-ciri yang melekat pada penduduk miskin tersebut. Ciri tersebut antara lain ditandai dengan sikap dan tingkah laku penduduk yang menerima keadaan yang seakan-akan dapat dirubah, rendahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, rendahnya produktivitas, dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan Todaro, (2006:31).

Menurut Todaro (2006:269) penduduk miskin pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan dengan mata pencaharian pokok dibidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan dengan sektor ekonomi tradisional, meraka kebanyakan wanita dan anak-anak dari pada lelaki dewasa dan sering terkonsentrasi diantara kelompok etnis minoritas dan kelompok penduduk pribumi.

Menurut Todaro (2006:59) kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut dengan garis kemiskinan. Konsep ini juga sering disebut dengan kemiskinan absolut,

maksudnya untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Orang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal antara lain, pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan bekerja.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2015)

Kemiskinan oleh Bappenas (2005) didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Sebagaimana hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Menurut teori Malthus dalam Todaro dan Smith, (2006:29) pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara akan menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis. Malthus melukiskan suatu kecenderungan universal bahwa jumlah populasi di suatu negara akan meningkat sangat cepat menurut deret ukur. Sementara itu, karena adanya proses penambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap, yaitu tanah, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung. Karena pertumbuhan pengadaan pangan tidak dapat berpacu secara memadai atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat agraris, pendapatan perkapita diartikan sebagai produksi pangan perkapita) cenderung terus mengalami penurunan sampai sedemikian rendahnya sehingga segenap populasi harus bertahan pada kondisi sedikit di atas tingkat subsisten. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat kehidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

b. Jenis - Jenis Kemiskinan

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse dalam Arsyad, (2004:238) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk

menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

Upaya pengentasan kemiskinan sangat membutuhkan peran pemerintah, sesuai dengan peranannya yaitu peran alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Peran tersebut harus dilaksanakan dengan baik jika ingin masalah kemiskinan terselesaikan. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk kemiskinan

secara tidak langsung dapat menurunkan jumlah penduduk miskin.

Menurut Fan (2004). Ia membuktikan bahwa pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur dan jasa di daerah pedesaan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan di sektor pertanian yang menjadi sektor terbesar terjadinya kemiskinan di negara berkembang. Selain itu pengeluaran pembangunan untuk teknologi dan modal manusia juga merupakan faktor yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di negara berkembang.

Menurut Todaro (2006:264) terdapat pendapat yang santer terdengar di kalangan pembuat kebijakan bahwa pengeluaran publik yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan akan mengurangi dana yang yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan. Pendapat yang mengatakan bahwa konsentrasi penuh untuk mengurangi kemiskinan akan memperlambat tingkat pertumbuhan sebanding dengan argumen yang menyatakan bahwa derajat ketimpangan yang rendah akan mengalami tingkat pertumbuhan yang juga lambat. Hubungan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan adalah negatif. Hal ini berarti pengeluaran pemerintah ditingkatkan, maka tingkat kemiskinan secara moderat mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan kenaikan alokasi pengeluaran pemerintah akan menaikkan produktifitas dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah di sektor belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Dengan demikian yang dimaksud

dengan pembangunan pemerintah disini adalah pengeluaran pembangunan, karena pengeluaran pembangunan merupakan suatu bentuk investasi yang dilakukan pemerintah yang secara langsung yang nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005). Dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Jenis- Jenis Belanja Modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (PP No. 24 Tahun 2005) :

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat

dikategorikan kedalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Syaiful (2008) mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat.

Pengeluaran pemerintah menurut Suparmoko (2000:44-45) dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

- a. Pengeluaran itu merupakan suatu investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang.
- b. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan masyarakat.
- c. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
- d. Menyebabkan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Wagner dalam Guritno (2002:171-172). mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, U.S. dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan

pendapatnya dalam bentuk hukum, dimana hukum Wagner sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dasar hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (USA, German, Jepang), tetapi hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar eksternalitas. Wagner menyadari bahwa dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit dan kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang tersebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Belanja modal memiliki peran penting dalam meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi nilai rasio belanja modal maka semakin tinggi pula diharapkan dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut (BPS, 2015). Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh

positif pada pertumbuhan ekonomi. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Banyak penelitian yang menjelaskan hubungan empiris antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi.

Dari penelitian yang telah ada, terdapat inkonsistensi hasil penelitian tentang pengaruh peningkatan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh BAPPENAS (2006) dalam lingkup wilayah regional Indonesia menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan belanja modal akan berdampak positif pada perbaikan kinerja ekonomi makro baik di tingkat nasional maupun regional.

Berdasarkan paparan teori diatas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya kegagalan pasar dalam menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat, maka perlu campur tangan pemerintah. Dalam hal ini diperlukan pengeluaran yang cukup untuk mencapai tujuan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Sesuai dengan pendapat Wagner apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat, maka perlu adanya pengeluaran pemerintah di sektor publik untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Pengeluaran pemerintah di sektor publik merupakan pengeluaran pemerintah yang mencakup kebijakan fiskal

dan dikeluarkan untuk sektor publik dalam mencapai pembangunan suatu daerah yang akan meningkatkan pendapatan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

4. Teori Wilayah

a. Pemetaan

Pemetaan adalah pengelompokan suatu kumpulan wilayah yang berkaitan dengan beberapa letak geografis wilayah yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, sumberdaya, dan potensi penduduk yang berpengaruh terhadap social kultural yang memiliki ciri khas khusus dalam penggunaan skala yang tepat. (Soekidjo, 1994 dalam anonym,2015).

b. Proses Pemetaan

Proses pemetaan Proses pemetaan yaitu tahapan yang harus dilakukandengan perancangan sebuah peta. Menurut Intan Pernanasari (2007) dalam anonym 2017, mengemukakan bahwa: ada 3 tahap proses dalam pemetaan yang harus dilakukan:

1. Tahap Pengumpulan Data

Langkah awal dalam proses pemetaan dimulai dari pengumpulan data. Data merupakan suatu bahan yang diperlukan dalam proses pemetaan. Keberadaan data sangat penting artinya, dengan data seseorang dapat melakukan analisis evaluasi tentang suatu data wilayah tertentu. Data yang dipetakan dapat berupa data primer atau data sekunder. Data yang dapat dipetakan adalah data yang bersifat spasial, artinya data tersebut terdistribusi atau tersebar secara keruangan pada

suatu wilayah tertentu. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dahulu menurut jenisnya seperti kelompok data kualitatif atau data kuantitatif.

Pengenalan sifat data sangat penting untuk simbolisasi atau penentuan dan pemilihan bentuk simbol, sehingga simbol tersebut akan mudah dibaca dan dimengerti. Setelah data dikelompokkan dalam tabel-tabel, sebelum diolah ditentukan dulu jenis simbol yang akan digunakan. Untuk data kuantitatif dapat menggunakan simbol batang, lingkaran, arsir bertingkat dan sebagainya, melakukan perhitungan-perhitungan untuk memperoleh bentuk simbol yang sesuai.

2. Tahap Penyajian Data

Langkah pemetaan kedua berupa penyajian data. Tahap ini merupakan upaya melukiskan atau menggambarkan data dalam bentuk simbol, supaya data tersebut menarik, mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna (users). Penyajian data pada sebuah peta harus dirancang secara baik dan benar supaya tujuan pemetaan dapat tercapai.

3. Tahap Penggunaan Peta

Tahap penggunaan peta merupakan tahap penting karena menentukan keberhasilan pembuatan suatu peta. Peta yang dirancang dengan baik akan dapat digunakan/dibaca dengan mudah. Peta merupakan alat untuk melakukan komunikasi, sehingga pada peta harus terjalin interaksi antar pembuat peta (map maker) dengan pengguna peta (map users). Pembuat peta harus dapat merancang peta sedemikian rupa

sehingga peta mudah dibaca, diinterpretasi dan dianalisis oleh pengguna peta. Pengguna harus dapat membaca peta dan memperoleh gambaran informasi sebenarnya dilapangan (real world).

Menurut Taringan (2006:77) Seorang perencanaan wilayah harus memiliki kemampuan untuk menganalisis potensi ekonomi wilayahnya. Hal ini terkait dengan kewajiban di suatu sisi menentukan sektor-sektor riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan sisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut.

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi, atau ilmu menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial.

Menurut Sjafrizal, (2008:7) Untuk dapat mewujudkan analisa teori yang baik dan harmonis, konsep wilayah (*region*) digunakan sebagai representasi dari unsur ruang (*space*). Dalam hal ini, *region* diartikan sebagai suatu kesatuan ruang yang dikelompokkan berdasarkan unsur tertentu tergantung dari tujuan analisa. Unsur tertentu tersebut dapat menyangkut dengan kondisi sosial, ekonomi maupun berkaitan antara wilayah. Bahkan pengelompokkan wilayah dapat pula dilakukan tidak berdasarkan pertimbangan ekonomi, tetapi pertimbangan kemampuan administrasi pemerintah.

Berdasarkan beberapa unsur utama yang dipertimbangkan dalam

pengelompokkan wilayah tersebut, secara umum terdapat 4 bentuk wilayah yang banyak digunakan dalam Analisa Ekonomi Regional, yaitu :

- 1) Homogeneous Region, yaitu kesatuan wilayah yang bersangkutan. Sifat-sifat atau ciri-ciri homogen ini misalnya dalam hal ekonomi (seperti daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang homogen, daerah dengan tingkat pendapatan rendah atau miskin, geografi seperti wilayah yang mempunyai topografi atau iklim yang sama dan sebagainya.
- 2) Nodal Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan keterkaitan sosial-ekonomi yang erat antar daerah. Keterkaitan ini menjadi penting karena dapat mendorong terbentuknya kesatuan yang erat antara beberapa daerah atau negara terkait. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa ataupun komunikasi dan transportasi.
- 3) Planning Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk untuk tujuan penyusunan perencanaan pembangunan. Termasuk ke dalam wilayah ini antara lain adalah wilayah pembangunan dalam perencanaan pembangunan baik pada tingkat nasional maupun provinsi atau kabupaten dan kota.
- 4) Administrative Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kebutuhan administrasi pemerintahan. Termasuk ke dalam wilayah ini adalah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa

Metode kuadran digunakan untuk menampilkan peta kemampuan

keuangan daerah, masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai *Share* dan *Growth*, dengan nilai share dan growth maka masing-masing daerah akan di bagi menjadi empat bagian, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. (Bappenas, 2003).

c. Tripologi Klassen

Sebagai implikasi dari perbedaan struktur dan potensi ekonomi wilayah, pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah cenderung sangat bervariasi satu sama lainnya. Ada daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, tetapi ada pula yang relatif lambat dan bahkan ada pula yang relatif lambat.

Pengelompokan daerah menurut struktur pertumbuhan dan tingkat pembangunan ini antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan Matrik Tripologi Klassen. Dalam hal ini, pengelompokan daerah dilakukan dengan menggunakan dua indikator yaitu: laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita. Dengan cara demikian, akan terdapat empat kelompok daerah yaitu :

1. Daerah maju (Developed Region) pada kuadran I dimana laju pertumbuhan dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari rata-rata.
2. Daerah maju tapi tertekan pada kuadran II di mana tingkat pendapatan perkapita daerah lebih tinggi dari rata-rata.
3. Daerah Berkembang pada kuadran III dimana tingkat pendapatan perkapita masih berada di bawah rata-rata.
4. Daerah Tertinggal pada kuadran IV dimana baik laju pertumbuhan

maupun pendapatan perkapita daerah ini berada di bawah rata-rata.

Klasifikasi Tipologi kelas Pendekatan Daerah

Y R	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Wilayah Maju dan Tumbuh Cepat I	Wilayah Bekembang Cepat III
$r_i < r$	Wilayah Maju tetapi Tertekan II	Wilayah Relatif Tertinggal IV

Sumber : (Sjafrizal, 2008:197)

Keterangan:

r_i : Laju pertumbuhan PDRB perkapita kabupaten/kota

y_i : PDRB perkapita kabupaten/kota

r : Laju pertumbuhan per kapita Provinsi Sumatera Barat

y : PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat

B. Penelitian Terdahulu

Dihan Lucky (2013) dengan judul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Melalui Pengeluaran Modal (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)”. Menjelaskan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan yang diukur dari rasio beban terhadap pendapatan, usaha fiskal, kemampuan pembiayaan, dan tingkat desentralisasi fiskal terhadap jumlah variabel, yaitu: (1) belanja modal, (2) pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, (3) pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan melalui belanja modal, dan (4) kemiskinan melalui belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan metode analisis jalur dan analisis kuadran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel rasio pengeluaran terhadap pendapatan, usaha fiskal, dan tingkat fiskal variabel desentralisasi yang memiliki pengaruh tidak langsung signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (secara positif) dan kemiskinan (secara negatif) sedangkan untuk dampak kinerja keuangan melalui belanja modal dan Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan memiliki pengaruh tidak langsung dan negatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat persamaan variabel penelitian dengan penulis yaitu belanja modal dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi perbedaan dengan penelitian Dina Apriana yaitu yaitu salah satu variabel serta daerah penelitian.

Setiyawati Anis (2007) dengan judul “Analisis Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur”. Penelitian ini menyatakan bahwa belanja pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja modal memberikan dampak pada penurunan jumlah pengangguran hal ini akan mengurangi persentase jumlah penduduk miskin yang ada dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur baru, pemeliharaan infrastruktur, dan pemerintah membuka lapangan kerja baru bagi pengangguran yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat persamaan variabel penelitian dengan penulis yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang menjadi perbedaan dengan penelitian setiyawati Anis yaitu yaitu salah satu variabel serta daerah penelitian.

Adrianus Maabuat (2016) “(Pemetaan Wilayah Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara)” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemetaan wilayah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan persentase jumlah penduduk miskin di kabupaten dan kota. analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang dideskripsikan dalam bentuk table dan kuadran Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kota Kotamobagu dan Kabupaten Minahasa Utara mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dan persentase penduduk miskin di bawah rata-rata selama tahun 2010-2014 menjelaskan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Pada penelitian Adrianus Maabuat persamaan dengan penelitian penulis yaitu persamaan variabel dan persamaan analisis yang dipakai penelitian, namun perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini memetakan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan sedangkan penulis melakukan penelitian untuk melihat pemetaan wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berdasarkan belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

C. Kerangka Konseptual

Pengeluaran pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercatat dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk

Nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.

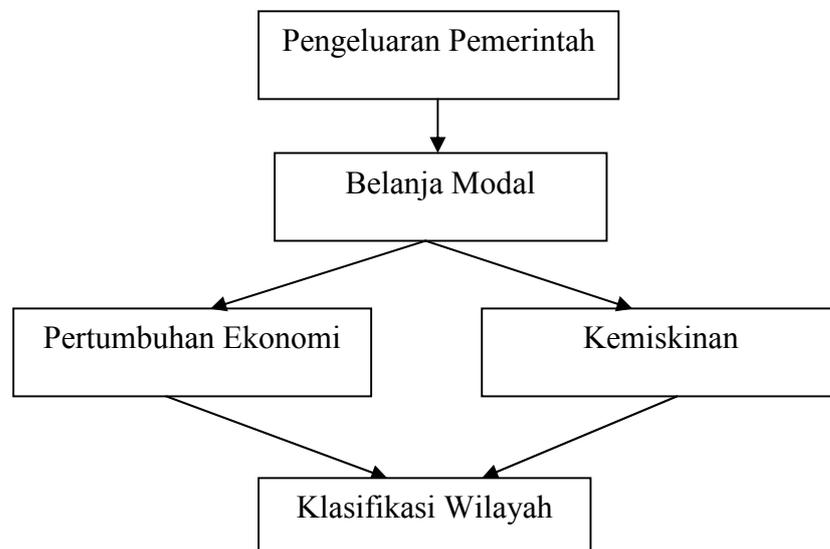
Kesejahteraan suatu daerah bisa diukur dengan seberapa banyak pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan. Semakin banyak pengeluaran pemerintah maka kesejahteraan suatu daerah akan tinggi. Pengeluaran pemerintah dibagi atas dua belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dimana belanja langsung mencakup belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dimana belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana semakin tinggi belanja modal maka pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi, dan apabila belanja modal rendah maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan rendah.

Selain pertumbuhan ekonomi, belanja modal juga berpengaruh terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dimana semakin tinggi belanja modal, maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah dan apabila belanja modal rendah maka tingkat kemiskinan

akan semakin tinggi. Apabila pertumbuhan ekonomi disuatu daerah itu tinggi dan kemiskinannya rendah maka pemetaan wilayah tersebut akan baik.

Untuk lebih jelasnya dapat diketahui bahwa pengaruh Belanja Modal Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan tersebut dapat digambarkan pada kerangka konseptual sebagai berikut :



GAMBAR 1. Kerangka Konseptual Analisis Pemetaan Wilayah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Berdasarkan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan .

Berdasarkan hasil pengelompokan data dengan menggunakan analisis regresi panel dan pembahasan terhadap hasil penelitian, antara variabel bebas yaitu belanja modal dan variabel terikat pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Sumatera Barat, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dengan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat sebagai sampel, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemetaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi dan belanja modal dengan kemiskinan. Menggunakan analisis tripologi klassen adalah pengelompokan berdasarkan 4 kuadran, dimana menghasilkan kelompok yang terdiri dari kuadran I kelompok ideal yang mempunyai belanja modal dan pertumbuhan ekonomi daerahnya tinggi, kuadran II kelompok belum ideal yang belanja modalnya tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi rendah, kuadran III kelompok yang baik belanja modal rendah pertumbuhan ekonomi tinggi dan kuadran IV kelompok yang paling buruk yaitu belanja modal dan pertumbuhan ekonomi daerahnya rendah, dimana pengelompokan berdasarkan belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi menghasilkan bahwa dari tahun 2011 sampai 2016 rata-rata Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berada pada kuadran IV kelompok yang paling buruk, dimana belanja modal rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten PadangPariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman,

Kabupaten Solok Selatan dan Kota Pariaman. Selanjutnya pengelompokan berdasarkan belanja modal dengan kemiskinan menghasilkan bahwa dari tahun 2011 sampai 2016 rata-rata Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berada pada kuadran I kelompok belum ideal, dimana belanja modal yang tinggi belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya serta dari hasil penelitian ini dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang disajikan menunjukkan tidak semua daerah yang mengalami peningkatan pada belanja modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan yang bisa meningkatkan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi.
2. Pengeluaran pemerintah harus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah dituntut berperan aktif dalam memberikan fasilitas fisik atau infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dan harus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi terjadi

secara merata (mengurangi disparita pertumbuhan ekonomi) di Sumatera Barat.

3. Daerah yang berada pada kondisi terburuk diharapkan pemerintah daerahnya dapat melakukan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah agar dapat mengejar ketertinggalanya dan bisa bersaing dengan daerah lain.
4. Bersamaan dengan itu pemerintah daerah harus mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan terutama pada daerah-daerah yang berada pada presentase penduduk miskin di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat dengan cara mengontrol pengeluaran belanja modal agar dana yang dikeluarkan terealisasi dan tepat sasaran dan melakukan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menurunkan jumlah penduduk miskin.
5. Pemerintah daerah perlu menjaga kestabilan ekonomi, agar dimasa yang akan datang tingkat kemiskinan akan semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexiou Constantinous. 2009. Government Spending and Economic Growth : Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SSE). *Journal of Economic and Social Research* 11(1) : 1-16.
- Amalia, Rahma dkk. 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat*: Jurnal Analisis, Volume 4, Nomor 2, Desember 2015: Halaman 183-189
- Adrianus Maabuat. 2016. *Pemetaan Wilayah Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara*: Jurnal Analisis, Volume 12, Nomor 2, Mei 2016: Halaman 87-94
- Anonim. 2014. Peta. (Online), (<http://softilmu.blogspot.com/2014/08/peta.html>), diakses pada tanggal 26 September 2017.
- Anonim. 2017. Pemetaan 2. (Online), (http://www.academia.edu/16537674/PEMETAAN_2), diakses pada tanggal 26 September 2017.
- Arsyad. Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Badan Pusat Statistik. *Sumatera Barat Dalam Angka 2011-2015*. BPS Sumatera Barat. Padang.
- Bappenas. 2003. *Peta kemampuan Keuangan Provinsi Daam Era Otonomi*.
- _____. 2005. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan, Komite Penanggulangan Kemiskinan, Januari 2005.
- _____. 2009. Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor.
- Dihan Lucky. 2013. Analysis Of The Effect Of Regional Performance To Economic Growth and Proverty Through Capital Expenditure (Case study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol. 4, No. 19, 2013. (<http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/viewFile/9804/9989>), diakses pada tanggal 15 Januari 2017.